

Efektifitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar)

Hery Pandapotan Silitonga¹
Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung, Jl. Surabaya No.19 Pematangsiantar,
Indonesia, 21118
hery@stiesultanaqung.ac.id

Jenni Gultom²
Program Studi Pascasarjana Akuntansi, Universitas Negeri Medan
jennygultompudan@gmail.com

Lenny Dermawan Sembiring³
Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung, Jl. Surabaya No.19 Pematangsiantar,
Indonesia, 21118
lennydermawansembiring@stiesultanaqung.ac.id

Abstract

This study aimed to determine the effectiveness of the implementation of the government internal control system to improve the quality of financial statements. The research design used was literature research that utilized a literature review as a reference. The data collection used the documentation and questionnaire methods by distributing questionnaires to the sample. The study was conducted from May 2020 to July 2020. The research population was the Regional Apparatus Organization of Pematangsiantar City. The flow of activities carried out in this study was carried out with an interactive cycle process. The reduced data were presented in the form of descriptions in accordance with the aspects of the study, which aimed to make it easier for researchers to interpret data and draw conclusions. Based on the results of the study that has been conducted, it is concluded that the effectiveness of the implementation of the government internal control system carried out by the Pematangsiantar City Government could improve the quality of the financial statements issued.

Keywords: The government internal control system (SPIP) Effectiveness, Quality of Financial Statements, Regional Apparatus Organization

Abstrak

Penelitian ialah bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Desain penelitian yang digunakan ialah desain kepustakaan dimana menggunakan tinjauan pustaka sebagai referensi. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan kuesioner dengan membagikan kuisisioner kepada sampel. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2020 sampai bulan Juli 2020. Populasi penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar. Alur kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dengan proses siklus interaktif. data yang direduksi tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi sesuai dengan aspek penelitian, yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menafsirkan data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan efektifitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang dilakukan Pemerintah Kota Pematangsiantar, dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan

Keywords: Efektifitas SPIP, Kualitas Laporan Keuangan, Organisasi Perangkat Daerah

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan mengalami perubahan disaat prinsip sentralisasi diubah menjadi desentralisasi, dimana era otonomi yang dimaksud agar setiap daerah menjalankan mekanisme penyelenggaraan pemerintahannya masing-masing. Penyelenggaraan desentralisasi yang dilakukan pada penyelenggaraan pemerintahan membuat perubahan dalam pengelolaan administrasi pemerintah (Sembiring et al., 2020). Dengan perubahan sistem pemerintahan tersebut agar setiap daerah diberikan wewenang atau kekuasaan dalam mengatur pembangunan yang akan dilakukan. Kekuasaan yang diberikan kepada daerah dalam mengelola kebijakan-kebijakan agar dapat memajukan masing-masing daerah (Akhmad Syarifudin, 2014). Proses desentralisasi ini dilakukan pemerintah dalam rangka mengetahui kepentingan masyarakat akan pelayanan yang akan diberikan pemerintah (Sari et al., 2020).

Setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Untuk mencapai *good governance* yang berkaitan tentang pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam memberikan layanan publik yang maksimal akuntabilitas. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh masing-masing daerah merupakan mekanisme mendasar dalam proses desentralisasi tersebut. Agar pengelolaan keuangan tersebut berjalan dengan baik diperlukan laporan keuangan yang berkualitas sebagai pertanggungjawaban atas laporan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang bersifat transparansi dan memiliki akuntabilitash. Laporan keuangan dapat menjadi mekanisme perlindungan terhadap krisis (Kosmidou et al., 2020), dan lingkungan yang kurang kondusif (Afiah & Azwari, 2015). Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari pemeriksaan auditor yang memberikan opini tentang penyajian laporan keuangan suatu organisasi, dan kesesuaian dengan standar akuntansi.

Kualitas laporan keuangan suatu daerah terlihat dari pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI (Ratifah & Ridwan, 2012). Pemeriksaan dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang telah disajikan. Laporan keuangan Kota Pematangsiantar telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK-RI..



Sumber: (BPK-RI, 2020)

Gambar 1. Opini Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK-RI akan mendapatkan opini mengenai kewajaran informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan. Kualitas Laporan keuangan kota Pematangsiantar tersebut BPK-RI memberikan penilaian mengenai kualitas Laporan Keuangan Kota Pematangsiantar pada tahun 2018 dan 2019 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah efektifitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Dengan penerapan SPIP pada pemerintah daerah hal ini akan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang akan semakin efektif yang dapat mengatasi rendahnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Akhmad Syarifudin, 2014). Penerapan SPIP, meningkatkan peran pengawasan internal pemerintah yang membuat akuntabilitas keuangan meningkat.. Dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan suatu daerah maka perlu dilakukan memperbaiki

SPIP maka informasi yang dihasilkan berupa laporan keuangan yang berkualitas (Yurniwati & Rizaldi, 2015). Bertitik belakang dari hal-hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS

Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian intern merupakan suatu aturan yang dibuat oleh suatu organisasi dalam menjalankan roda kegiatan yang terdapat diorganisasi tersebut yang sejalan dengan peraturan yang berlaku (Indonesia, 2008). Penerapan SPIP yang baik membuat suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan ketaatan laporan keuangan yang dihasilkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam mengukur SPIP dalam penelitian dengan komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, pengendalian aktivitas, sistem informasi dan komunikasi, serta pemantauan (Indonesia, 2008). Tujuan pengendalian internal untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus ada dalam pemerintahan, dimana akuntabilitas dapat memberikan gambaran suatu situasi yang dapat dipertanggungjawabkan (Herawati, 2014).

Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah sebagai sebuah entitas akuntansi memiliki kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang terjadi dan membandingkannya dengan apa yang sepatutnya. Apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan akan dikoreksi, agar pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat mencapai target yang diinginkan. Kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan adalah suatu laporan yang berisi informasi kondisi keuangan sebuah entitas (organisasi) yang disajikan pada akhir periode akuntansi yang memenuhi karakteristik kualitatif yang ditetapkan dalam standar (Peraturan Pemerintah No 71, 2010). Penilaian suksesnya proses pertanggungjawaban organisasi publik dalam mencapai tujuannya dengan penyampaian informasi keuangan yang telah dilakukan selama periode tertentu kepada publik secara terbuka, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi tersebut, dipergunakan publik untuk menilai penyelenggaraan kegiatan pemerintah

Kualitas laporan keuangan pemerintah dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang terdiri dari : relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Erlina & Rambe, 2015). Kualitas laporan keuangan tergantung dari pengendalian intern yang dilakukan pemerintah (Jiang & Chen, 2019). Laporan keuangan yang berkualitas akan memberikan informasi bagi pimpinan tentang seluruh kegiatan organisasi yang dapat dijadikan tolak ukur dalam pengambilan kebijakan yang akan dilakukan (Chen & Gong, 2019).

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan ialah desain kepustakaan dimana menggunakan tinjauan pustaka sebagai referensi. Pengumpulan data menggunakan metode kuisioner dan kuisioner dengan membagikan kuisioner kepada sampel. Pemerintah Kota Pematangsiantar menjadi objek dalam penelitian ini. Waktu Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2020 sampai bulan Juli 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pematangsiantar yang berjumlah 41 OPD. Teknik sampel jenuh digunakan dalam penelitian ini dimana seluruh populasi digunakan sampel dalam penelitian ini. Alur kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dengan proses siklus interaktif. data yang direduksi tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi sesuai dengan aspek penelitian, yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menafsirkan data dan menarik kesimpulan. Selanjutnya untuk pengukuran indikator penelitian menggunakan butir-butir pertanyaan yang dirangkum dalam bentuk kuisioner online yang dapat dijelaskan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel	Code	Item	Referensi
SPIP	KP1	Lingkungan Pengendalian	(Indonesia, 2008)
	KP2	Penilaian risiko	
	KP3	Pengendalian Aktivitas	
	KP4	Sistem informasi dan komunikasi	
	KP5	Pemantauan	
Kualitas Laporan Keuangan	HG1	Relevan	(Peraturan Pemerintah No 71, 2010).
	HG2	Andal	
	HG3	Tepat Waktu	

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar yang berjumlah 41 OPD. Responden dalam penelitian ini dapat dikategorikan dalam beberapa karakteristik, yaitu: jenis kelamin, usia dan program studi serta alasan menggunakan *smartphone* OPPO. Berikut ini disajikan tabel 1 tentang uraian deskripsi responden:

Tabel 2. Deskripsi Responden

Data Responden		Frekuensi	%
Jenis Kelamin	Pria	35	85%
	Wanita	6	15%
Usia	< 30 - ≥ 40	10	24%
	< 41 - ≥ 50	5	12%
	< 51 - ≥ 60	27	64%
Pendidikan Terakhir	D3	0	0%
	S1	31	76%
	S2	10	24%
	S3	0	0%
Masa Kerja	< 1 Tahun	3	7
	1 Tahun - 5 Tahun	26	63
	> 5 Tahun	12	30

Sumber: Hasil olahan data (2020)

PEMBAHASAN

Tanggapan Responden Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP diukur melalui lima dimensi dan dioperasionalkan menjadi dua puluh satu indikator. Dimensi dari sistem pengendalian intern pemerintah meliputi lingkungan pengendalian terdiri dari delapan indikator, penilaian resiko terdiri dari tiga indikator, pengendalian aktivitas terdiri dari lima indikator, sistem informasi dan komunikasi terdiri dari dua indikator, dan pemantauan terdiri dari tiga indikator. Rekapitulasi persentase skor dan distribusi tanggapan responden mengenai sistem pengendalian intern pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Tanggapan Responden Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		
Lingkungan Pengendalian		Rata-Rata Jawaban
1	Tindakan disiplin atau sanksi atas pelanggaran disampaikan kepada instansi yang mengurus masalah kepegawaian	4,00
2	Pemerintah Daerah memiliki ketentuan yang jelas mengenai kapan seorang pegawai dapat memperoleh pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi	3,95
3	Pemerintah daerah memandang penting fungsi pengolahan data, fungsi akuntansi, keandalan laporan keuangan dan perlindungan terhadap asset/barang	4,27
4	Setiap pegawai di Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab	3,66
5	Pemerintah Daerah memiliki ketentuan yang jelas mengenai sanksi atas pelanggaran terhadap kebijakan dan prosedur yang ada	4,05
6	Pegawai memahami bahwa kinerja yang buruk berdampak terhadap organisasi	4,05
7	Inspektorat daerah memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan dan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah	4,07
8	Adanya koordinasi antar instansi di Pemerintah Daerah dalam mencapai kinerja.	4,20
Penilaian Risiko		
9	Identifikasi risiko sudah ditetapkan dalam bentuk dokumen	3,85
10	Pemerintah daerah sudah menganalisis risiko	4,00
11	Ada upaya untuk mengatasi dan meminimalisasi risiko	4,20
Aktivitas Pengendalian		
12	Ada mekanisme untuk mereview kinerja	4,10
13	Media untuk pencatatan dokumen tersedia dengan baik	4,12
14	Pencatatan seluruh asset telah dilakukan secara memadai	4,00
15	Terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan	4,02
16	Pencatatan dan dokumentasi dilakukan secara lengkap dan akurat dan memungkinkan dilakukannya penelusuran	3,95
Informasi dan Komunikasi		
17	Pimpinan mendukung pengembangan sistem informasi melalui komitmen terhadap sumber daya yang memadai	4,02
18	Tugas dan tanggung jawab dikomunikasikan melalui media yang memadai	4,00
Pemantauan		
19	Pemerintah daerah memiliki unit kerja yang melakukan pemantauan atas pelaksanaan seluruh kegiatan	4,07
20	Data yang dicatat oleh sistem informasi maupun keuangan telah dibandingkan secara periodik dengan fisiknya	4,00
21	Terdapat bukti telah dilakukannya fungsi pengendalian seperti review penyerapan anggaran dan tindak lanjut hasil pemeriksaan	4,02

Sumber: Sumber: Hasil olahan data (2020)

Berdasarkan jawaban responden di atas, efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, pengendalian aktivitas, sistem informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Rekapitulasi persentase skor dan distribusi tanggapan responden mengenai efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah Skor maksimum rata-rata tanggapan responden adalah pada dimensi pengendalian dan analisis resiko terletak yaitu sebesar 4,20. Hal ini berarti Organisasi Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar melalui inspektorat daerah selaku unit yang berfungsi melakukan sistem pengendalian internal telah melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Sedangkan skor minimum rata-rata tanggapan responden adalah pada lingkungan pengendalian. Hal ini terjadi karena lingkungan pengendalian yang harus dibangun pada pemerintah daerah meliputi beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang terkait yang harus bersinergi secara komprehensif untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga hal ini membutuhkan komitmen baik dari pimpinan dan seluruh pihak yang terkait agar dapat membangun lingkungan pengendalian yang memadai dan optimal.

Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan diukur dengan menggunakan tiga dimensi, yaitu relevan, andal dan tepat waktu. Dimensi relevan dilihat dari sudut pandang responden atas opini yang diberikan oleh BPK dan

kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. Dimensi andal dilihat dari indikator penyajian fakta secara jujur dan dimensi ketepatan waktu menggambarkan ketepatan waktu dalam penyampaian LKPD ke BPK. Rekapitulasi tanggapan responden atas dimensi pada variabel kualitas laporan keuangan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN		
Relevan		Rata-Rata Jawaban
1	Opini yang diberikan oleh BPK-RI mencerminkan keandalan laporan keuangan	3,93
2	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	4,27
Reliable (Andal)		
3	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.	4,20
Timeliness		
4	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke BPK adalah sangat penting untuk menjamin kualitas laporan keuangan	4,05

Sumber: Sumber: Hasil olahan data (2020)

Berdasarkan jawaban responden di atas, sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa laporan keuangan berkualitas terdiri dari beberapa unsur yaitu melalui opini yang diberikan oleh BPK-RI selaku auditor eksternal pemerintah daerah, penyajian informasi dalam laporan keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material, dan laporan disampaikan secara tepat waktu.

Dilihat dari hasil penelitian atas tanggapan responden mengenai efektifitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar. Sumber daya manusia di pemerintah daerah belum menggunakan teknologi informasi secara maksimal. Melalui penggunaan *egovernment*, efisiensi dan efektivitas kerja dalam organisasi birokrasi pemerintahan akan tercapai. Akan tetapi, adanya resistensi terhadap perubahan khususnya dalam mengadopsi penggunaan *e-government* pada birokrasi pemerintahan umumnya dikarenakan rendahnya keinginan dan kemampuan untuk mendapatkan informasi melalui penggunaan teknologi informasi.

Hasil pada penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Rusvianto et al., 2018), (Herawati, 2014), dan (Afiah & Azwari, 2015), yang menyatakan bahwa penerapan efektifitas sistem pengendalian intern yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu berdasarkan penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah daerah harus meningkatkan dan memastikan agar semua unsur/dimensi yang ada didalam sistem pengendalian intern pemerintah berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan. Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar untuk dapat lebih maksimal untuk menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas untuk tujuan akuntabilitas dem tercapainya *good governance* pada pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai efektifitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Efektifitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang dilakukan Pemerintah Kota Pematangsiantar, dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Laporan keuangan yang berkualitas sebaiknya pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah. Melalui inspektorat sebagai unit yang berfungsi menjalankan aspek pengendalian intern pemerintah, maka penilaian sendiri (*self assessment*) harus dilaksanakan dengan lebih baik lagi secara komprehensif dan terintegrasi, agar pemerintah daerah Kota Pematangsiantar dapat lebih meningkatkan kualitas laporan keuangannya yang tercermin melalui opini yang diberikan oleh BPK-RI.

Penelitian ini menganalisis efektivitas penerapan sistem pengendalian inter pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kepada penelitian selanjutnya diharapkan untuk mebah waktu

penelitian dan variabel yang diteliti diantaranya gaya kepemimpinan, kesenjangan anggaran, sistem informasi keuangan daerah untuk melengkapi hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N. N., & Azwari, P. C. (2015). The Effect of the Implementation of Government Internal Control System (GICS) on the Quality of Financial Reporting of the Local Government and its Impact on the Principles of Good Governance: A Research in District, City, and Provincial Government in Sou. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 811–818. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.172>
- Akhmad Syarifudin. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen) Akhmad Syarifudin. *Jurnal Fokus Bisnis*, Volume 14, No 02, Desember 2014, 14(25), 26–44.
- BPK-RI. (2020). *Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020 Kota Pematangsiantar*. https://sumut.bpk.go.id/?page_id=18489
- Chen, A., & Gong, J. J. (2019). Accounting comparability, financial reporting quality, and the pricing of accruals. *Advances in Accounting*, 45, 100415. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2019.03.003>
- Erlina, & Rambe, O. S. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Salemba Empat.
- Herawati, T. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *STAR – Study & Accounting Research*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v2i1.64>
- Indonesia, P. R. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. 282.
- Jiang, H., & Chen, J. (2019). Short selling and financial reporting quality: Evidence from Chinese AH shares. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 15(1), 118–130. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2019.01.001>
- Kosmidou, K., Kousenidis, D., Ladas, A., & Negkakis, C. (2020). Regulation of capital flows: Effects on liquidity and the role of financial reporting quality. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 175, 86–97. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.04.005>
- Peraturan Pemerintah No 71. (2010). *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Ratifah, I., & Ridwan, M. (2012). Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Triekonomika*, 11(1), 29–39.
- Rusvianto, D., Mulyani, S., & Yuliafitri, I. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Bandung). *Jurnal Banque Syari*, 4(1), 33–67.
- Sari, D. C., Siregar, R. T., Silalahi, M., Butarbutar, M., Silitonga, H. P., Alam, H. V., Abidin, A. Z., & Rahmat, A. (2020). *Manajemen Pemerintah*. Ideaspublishing.
- Sembiring, L. D., Sudirman, A., & Silitonga, H. P. (2020). *Dampak Kejelasan Sasaran Anggaran dan Komitmen Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar*. 3(2), 436–445.
- Yurniwati, & Rizaldi, A. (2015). Control Environment Analysis at Government Internal Control System: Indonesia Case. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 844–850. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.111>